



**KEPALA DESA KEDUNGWARAS  
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KEDUNGWARAS  
NOMOR : 06 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEDUNGWARAS**

**Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungwaras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungwaras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2020

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawannya Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 )
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
  23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68
25. Perubahan atas peraturan bupati Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, Surat Camat Modo Tanggal 30 Desember 2020 Nomor :188/51/431.303.07/2020 Evaluasi Rancangan Anggaran dan Belanja desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2021 .
26. Peraturan Desa Kedungwaras 22 Tahun 2020 Tentang Tata kelola Bumdes Desa Kedungwaras;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGWARAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 1. Pendapatan desa:                         | Rp 1.234.867.500 |
| 2. Belanja :                                |                  |
| a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 399.527.700   |
| b) Bidang Pembangunan                       | Rp 253.000.000   |
| c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | Rp.433.458.000   |
| d) Bidang Tak terduga                       | Rp -             |
| <br>Jumlah Belanja                          | Rp 1.234.867.500 |
| Surplus/defisit                             | Rp.....          |
| 3. Pembiayaan Desa :                        |                  |
| a. Penerimaan Pembayaran                    | Rp               |
| a. Pengeluaran Pembiayaan                   | <u>Rp</u>        |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                    | Rp.-             |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kedungwaras  
Pada tanggal 15 Oktober 2020



Diundangkan di Kedungwaras  
Pada tanggal 15 Oktober 2020  
Pit. SEKRETARIS DESA KEDUNGWARAS

DAFID TINUS FITRANTO  
LEMBARAN DESWA KEDUNGWARAS TAHUN 2020 NOMOR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PEMERINTAH DESA KEDUNGWARAS**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

| KODE REKENING    | URAIAN                                    | ANGGARAN             | KET |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----|
| <b>1</b>         | <b>PENDAPATAN</b>                         | <b>1,243,267,500</b> |     |
| <b>1 1</b>       | <b>Pendapatan Asli Desa</b>               | <b>130,900,000</b>   | PAD |
|                  | Hasil Usaha Desa                          |                      |     |
|                  | Pengelolaan Tanah Kas Desa ( Ex Bengkok ) | 107,500,000          | PAD |
|                  | Lelang Tanah Kas Desa Tanah Sekdes        | 15,000,000           | PAD |
|                  | BUMDES                                    | 8400000              | PAD |
|                  | Swadaya dan gotong royong di uangkan      |                      |     |
|                  | Lain lain Pendapatan Asli Desa yg sah     |                      |     |
| <b>1 2</b>       | <b>Pendapatan Tranfer</b>                 | <b>1,112,367,500</b> |     |
|                  | Dana Desa ( DD )                          | 773,458,000          | DD  |
|                  | Bagi Hasil Pajak                          | 32,322,200           | BHP |
|                  | Alokasi Dana Desa ( ADD )                 | 306,587,300          | ADD |
| <b>1 2 4</b>     | <b>Bantuan Keuangan</b>                   |                      |     |
|                  | <b>1 Bantuan Propinsi</b>                 |                      |     |
|                  | Pembangunan Jalan Poros Desa              |                      |     |
|                  | Pembangunan TPT Jal;an Poros              |                      |     |
|                  | Pembangunan Balai Desa                    |                      |     |
|                  | <b>2 Pembangunan Keuangan Kabupaten</b>   |                      |     |
|                  | Pambangunan jln rabat Poros Dusun         |                      |     |
|                  | Pembangunan jln rabat poros desa          |                      |     |
| <b>1 3</b>       | <b>Pendapatan Lain lain</b>               |                      |     |
| <b>1 3 1</b>     | <b>1 Hibah dan sumbangan pihak ke 3</b>   |                      |     |
|                  | 2 lain-lain Pendapatan Desa yg sah        |                      |     |
|                  | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                  |                      |     |
| <b>2</b>         | <b>BELANJA</b>                            | <b>1,243,267,500</b> |     |
| <b>2 1</b>       | <b>Bidang penyelenggaraan Pemdes.</b>     |                      |     |
| <b>2 1 1</b>     | <b>Silap dan Tunjangan</b>                | <b>399,527,700</b>   |     |
|                  | 1 Belanja Pegawai                         |                      |     |
|                  | 2 Silap Kepala Desa                       | 36,000,000           | ADD |
|                  | 3 Silap Perangkat Desa                    | 218,397,600          | ADD |
|                  | 4 Tunjangan Kepala Desa                   | 19,350,000           | PAD |
|                  | 5 Tunjangan Perangkat Desa                | 88,150,000           | PAD |
|                  | 6 Tunjangan Plt Sekdes                    | 8,000,000            | PAD |
|                  | 7 Tunjangan Kinerja Kepala Desa           | 4,249,200            | BHP |
|                  | 8 Tunjangan Kinerja Perangkat Desa        | 19,480,900           | BHP |
|                  | 9 Insentif BPD                            | 5,900,000            | ADD |
| <b>2 1 2</b>     | <b>Operasional Perkantoran</b>            |                      |     |
| <b>2 1 2 1</b>   | <b>1 Kebutuhan Kantor</b>                 | <b>7,685,714</b>     |     |
|                  | 2 Alat Tulis Kantor                       | 1,685,714            | ADD |
|                  | 3 Biaya MUSDES                            | 3,000,000            | ADD |
|                  | 4 Biaya Penyusunan RKP                    | 1,000,000            | ADD |
|                  | 5 Biaya Penyusunan APBDes                 | 1,000,000            | ADD |
|                  | 6 Penyusunan Keuangan Siskeudes           | 1,000,000            | ADD |
|                  | <b>2 Belanja Modal</b>                    | <b>23,242,100</b>    |     |
|                  | Pengadaan Meja Rapat                      | 5,250,000            | ADD |
|                  | Pengadaan Komputer                        | 8,400,000            | PAD |
|                  | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran | 6 192,100            | BHP |
|                  | Biaya Listrik                             | 1 000,000            | ADD |
|                  | Biaya Pulsa Modem                         | 2 400,000            | BHP |
| <b>2 1 3</b>     | <b>Operasional BPD</b>                    | <b>4,000,000</b>     | ADD |
| <b>2 1 3 1</b>   | <b>1 Belanja Pegawai</b>                  |                      |     |
|                  | 2 Uang Sidang                             | 2,000,000            | ADD |
|                  | 3 Kertas HVS 70 gr                        | 288,000              | ADD |
|                  | 4 Penggandaan                             | 687,000              | ADD |
|                  | 5 Konsumsi rapat                          | 1,025,000            | ADD |
| <b>2 1 4</b>     | <b>Operasional RT</b>                     | <b>5,950,000</b>     | ADD |
|                  | 1 Belanja Pegawai                         |                      |     |
|                  | 2 Insentif RT                             | 5,950,000            | ADD |
| <b>2 1 5</b>     | <b>Operasional RW</b>                     | <b>1,000,000</b>     | ADD |
|                  | 1 insentif RW                             | 1,000,000            | ADD |
| <b>2 1 6</b>     | <b>Operasional LPM</b>                    | <b>2,500,000</b>     | ADD |
| <b>2 1 6 1</b>   | <b>1 Belanja Pegawai</b>                  |                      |     |
|                  | 2 Insentif LPM                            | 2,500,000            | ADD |
| <b>2 1 7</b>     | <b>Operasional PKK</b>                    | <b>2,500,000</b>     | ADD |
| <b>2 1 7 1</b>   | <b>1 Belanja Pegawai</b>                  |                      |     |
|                  | Insentif PKK                              | 1,500,000            | ADD |
|                  | Alat Tulis Kantor                         | 300,000              | ADD |
|                  | Kertas HVS 70 gr                          | 100,000              | ADD |
|                  | Map dan Bolpoin                           | 100,000              | ADD |
|                  | Penggandaan                               | 100,000              | ADD |
|                  | Konsumsi Rapat                            | 400,000              | ADD |
| <b>2 1 7 1</b>   | <b>Operasional Kepemudaan</b>             | <b>1,100,000</b>     | ADD |
| <b>2 1 7 1 1</b> | <b>1 Belanja barang dan jasa</b>          |                      |     |
|                  | Belanja Peralatan Olah Raga               | 1,100,000            | ADD |

|   |   |    |                                                  |               |            |
|---|---|----|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 2 | 1 | 8  | Operasional Posyandu                             |               |            |
| 2 | 1 | 8  | 1 Belanja barang dan jasa                        | 1,500,000     | ADD        |
|   |   |    | Insentif Kader Posyandu                          | 1,200,000     | ADD        |
|   |   |    | Penggandaan                                      | 50,000        | ADD        |
|   |   |    | Konsumsi Rapat                                   | 250,000       | ADD        |
| 2 | 1 | 9  | Kegiatan Kamtibmas                               |               |            |
| 2 | 1 | 9  | 1 Belanja barang dan jasa                        |               |            |
| 2 | 1 | 10 | Operasional Kesehatan                            |               |            |
| 2 | 1 | 10 | 1 Asuransi BPJS                                  | 13,803,986    | ADD        |
|   |   |    | 2 BPJS Kesehatan                                 | 12,191,292    |            |
|   |   |    | 3 BPJS Ketenagakerjaan                           | 1,612,694     |            |
| 2 | 1 | 11 | Sumbangan pihak ke 3                             |               |            |
| 2 | 1 | 12 |                                                  |               |            |
| 2 | 1 | 12 |                                                  |               |            |
| 2 | 2 | 13 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa              | 217,300,000   |            |
| 2 | 2 | 14 | 1 Pembangunan Irigasi Sawah Dsn Kedung ( PKTD)   | 40,000,000    | DD         |
|   |   |    | 2 Pembuatan Pagupon Burung Hantu                 | 12,000,000    | DD         |
|   |   |    | 3 Pemb. TPT Jalan Dusun Kedung (PKTD)            | 80,000,000    | DD         |
|   |   |    | 4 PJU Dusun Landeyan                             | 22,300,000    | DD         |
|   |   |    | 5 Pemb. TPT Dusun Ranjung ( PKTD )               | 40,000,000    | DD         |
|   |   |    | 6 Pengadaan Papan Informasi 4 Unit               | 23,000,000    | DD         |
| 2 | 2 | 1  | Pembangunan Balai Desa                           |               |            |
|   |   |    | 1 Pembangunan Kamar Mandi                        |               |            |
| 2 | 3 |    | BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT                      | 2,500,000     |            |
|   |   |    | Pembinaan Anggota LINMAS                         | 2,500,000     | PAD        |
| 2 | 4 |    | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                   | 143,900,000   |            |
| 2 | 4 | 1  | 1 Operasional Operator SISKUDES                  | 7,000,000     | DD         |
|   |   |    | 2 Pelatihan Pemetaan dan Potensi Desa            | 10,000,000    | DD         |
|   |   |    | 3 Kompres Hama Tikus                             | 4,500,000     | PAD        |
|   |   |    | 4 Alat Voking                                    | 10,000,000    | DD         |
|   |   |    | 5 Honorarium Guru PAUD                           | 10,000,000    | DD         |
|   |   |    | 6 Pengadaan Alat Alat Olahraga Kartar            | 12,400,000    | DD         |
|   |   |    | 7 Pelatihan Merajut Ibu-ibu PKK                  | 10,000,000    | DD         |
|   |   |    | 8 Penguatan Modal BUMDES                         | 60,000,000    | DD         |
|   |   |    | 10 Pelatihan IT ( Websait ) Lembaga Pemerintahan | 20,000,000    | DD         |
| 2 | 4 | 2  | Menunjang kegiatan Stanting                      | 47,850,000    |            |
|   |   |    | 1 Insentif Kader Posyandu                        | 10,000,000    | DD         |
|   |   |    | 2 Pengadaan Tikar Ukur Balita                    | 1,000,000     | DD         |
|   |   |    | 3 Pengadaan HP Android untuk KPM                 | 3,000,000     | DD         |
|   |   |    | 4 Untuk Pemberian PMT Balita                     | 10,350,000    | DD         |
|   |   |    | 5 Pelatihan Tata Boga ( Kue )                    | 5,000,000     | DD         |
|   |   |    | 6 Pelatihan Kader Kesehatan                      | 2,100,000     | DD         |
|   |   |    | 7 Desa Sehat                                     | 14,000,000    |            |
|   |   |    | 8 Insentif KPM                                   | 2,400,000     | DD         |
| 2 | 4 | 3  | Penanggulangan Bencana                           | 372,000,000   |            |
|   |   |    | 8 BLT ( Covid 19 )                               | 310,000,000   | DD         |
|   |   |    | 9 Covid 19                                       | 62,000,000    | DD         |
|   |   |    | JUMLAH BELANJA                                   | 1,243,267,500 |            |
|   |   |    | SURPLUS/DIFISID                                  |               |            |
|   |   |    | Penerimaan Pembayaran                            |               |            |
|   |   |    | Silpa tahun 2020/ Perwatan Jalan                 | 7,200,000     | Silpa 2020 |
|   |   |    | Penerimaan Dana Cadangan                         |               |            |
|   |   |    | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan              |               |            |
|   |   |    | JUMLAH                                           |               |            |
|   |   |    | Pengeluaran Pembiayaan                           |               |            |
|   |   |    | Pembentukan Dana Cadangan                        |               |            |
|   |   |    | Penyertaan Modal Desa                            |               |            |

Disetujui oleh  
Kepala Desa Kedungwaras  
  
MOH. NAWIK. GOTOALI, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO  
KABUPATEN LAMONGAN  
Alamat Jalan Sidomukti Nomor 01 Kedungwaras 62275**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS  
KECAMATAN MODO  
NOMOR : 01 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PERATURAN DESA KEDUNGWARAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungwaras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungwaras tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( P APBDesa ) Tahun Anggaran 2020

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
27. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
28. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 )
29. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )
30. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

32. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ; 3
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 )
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
47. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : MENYEPAKATI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS TAHUN ANGGARAN 2021.

**Pasal 1**

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2021

**Pasal 2**

Jumlah Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

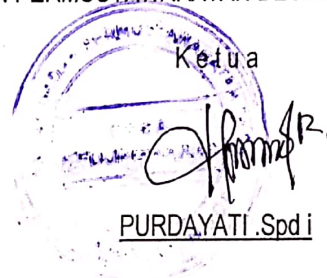
**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kedungwaras

Pada tanggal : 30 Desember 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS**

Ketua  
  
PURDAYATI .Spdi



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO  
KABUPATEN LAMONGAN  
Alamat Jalan Sidomukti Nomor 01 Kedungwaras 62275

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
PERATURAN DESA KEDUNGWARASW TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS  
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR 04/413.303.7/2021

Pada hari ini senen tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh ,bertempat di Balai Desa Kedungwaras Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungwaras Perihal Peraturan Desa Kedungwaras Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan Rapat membahas Peraturan tersebut;

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usulan dan saran dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras, menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara menyepakati bersama Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras tahun Anggaran 2021, ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras  
Tanda tangan ;

- 1 PURDAYATI Spd.i  
Ketua
- 2 SULTONI  
Wakil Ketua
- 3 SITI SAMSIYAH  
Sekretaris
- 4 IMAM  
Anggota
- 5 SUNAJI  
Anggota
- 6 M.YAHYA KOMARUDIN ST  
Anggota
- 7 KUSNO  
Anggota